



**SIKAP POLITIK KOALISI PEREMPUAN INDONESIA
TERHADAP PEMILIHAN UMUM (PEMILU)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN PRESIDEN TAHUN 2014.**

Pandangan Koalisi Perempuan Indonesia Terhadap PEMILU 2014

- Pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat
- Pemilu sebagai sarana perubahan bangsa dan negara ke arah yang lebih baik
- Pemilu harus menempatkan rakyat sebagai subyek
- Pemilu yang diselenggarakan dengan baik akan menjadi sumbangan bagi pembangunan politik dan demokrasi serta menghindari krisis politik
- Menjadi golongan putih (atau tidak menggunakan hak pilih) berarti sama dengan membiarkan orang-orang yang tidak memenuhi kriteria yang kita butuhkan memimpin kita, untuk itu Pengurus dan seluruh anggota Koalisi Perempuan Indonesia didorong untuk menggunakan hak pilihnya serta mengajak masyarakat untuk aktif menggunakan hak pilihnya
- Penggunaan hak pilih dalam Pemilu 2014 haruslah didasarkan pada pengetahuan, kesadaran dan tanggung jawab terhadap pilihannya

Pemilu Legislatif 2014

Koalisi Perempuan Indonesia menyerukan agar dalam menggunakan Hak Pilih pada Pemilu Legislatif, Tidak memilih calon anggota legislatif yang:

- 1) Pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia,
- 2) Pelaku pelanggaran Hak Asasi Perempuan dan Hak Asasi Anak
- 3) Pelaku poligami
- 4) Sedang Terlibat kasus korupsi
- 5) Pelaku kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
- 6) Tidak mendukung keberagaman dan prinsip Kebhinekaan
- 7) Perusak lingkungan
- 8) Pemilik atau Kaki tangan pemodal (asing maupun dalam negeri) yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara.
- 9) Tidak mandiri dalam menjalankan fungsinya sebagai legislatif atau menjadi “Boneka” pihak lain.
- 10) Sekedar mengandalkan popularitas dan tidak memiliki kompetensi/kemampuan



- 11) Pelaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
- 12) Pelaku penyelewengan kekuasaan (mengggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan politiknya)

Koalisi Perempuan Indonesia menyerukan agar dalam menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilu Legislatif 2014, memilih calon anggota legislatif yang:

- 1) Dikenal luas sebagai orang yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan
- 2) Dekat, atau mudah dijangkau oleh konstituen dan masyarakat secara umum
- 3) Mampu menanggapi pengharapan konstituen dan masyarakat umum secara layak dan beradab
- 4) Memiliki agenda kerja yang nyata, terukur dan mudah dipahami oleh masyarakat
- 5) Dikenal sebagai orang yang jujur dan bersih

Pemilihan Presiden & Wakil Presiden

Koalisi Perempuan Indonesia menyerukan agar dalam menggunakan Hak Pilihnya Pemilihan Presiden, tidak memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden yang:

- Pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
- Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Perempuan dan Hak Asasi Anak
- Pelaku poligami (menikah lebih dari satu pasangan)
- Penjual aset-aset negara yang mengakibatkan kerugian negara
- Perusak lingkungan
- Mendiskriminasi atau bersikap dan bertindak tidak adil terhadap Ras, suku, agama/keyakinan, jenis kelamin, orientasi seksual, kelas sosial dan kelas ekonomi tertentu.
- Orang-orang yang hanya mementingkan kekuasaan dan serakah menguasai sumber-sumber ekonomi untuk kepentingan dirinya, keluarga dan kroninya.
- Pelaku Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
- Tidak mandiri dalam menjalankan fungsinya sebagai pimpinan Negara atau menjadi “Boneka” pihak lain.
- Pelaku penyelewengan kekuasaan (Mengggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan politiknya)

Yang didorong untuk dipilih

- Memiliki komitmen untuk menghormati, memenuhi, melindungi dan memajukan Hak Asasi Manusia
- Memiliki agenda keberpihakan terhadap rakyat miskin
- Memiliki komitmen mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- Komitmen mencegah dan menghentikan segala bentuk konflik dan mewujudkan perdamaian

Koalisi Perempuan Indonesia berkomitmen untuk :

- Turut mendukung dan mensukseskan Pemilu 2014 berjalan secara LUBER, jujur, adil, nir-kekerasan, aksesibel dan ramah lingkungan
- Melakukan pemantauan dan pengawalan suara mulai dari TPS, PPS, PPK, KPUD kab/Kota, KPUD Prov
- Melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu agar menjalankan mandat mereka sebagaimana termuat dalam UU
- Bersinergi dengan organisasi masyarakat sipil lainnya dalam pemantauan dan pengawalan suara perempuan
- Melaporkan praktek kecurangan dan pelanggaran yang terjadi dalam proses penghitungan

Koalisi Perempuan Indonesia, menolak :

- Segala bentuk politik uang
- Segala bentuk dan cara penyalahgunaan wewenang untuk memenangkan pemilu
- Segala bentuk dan cara-cara kekerasan selama proses pemilu dan penyelesaian sengketa pemilu.